

Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan *Narrative Policy Framework* di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya

Emmy Dyah Rahmawati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: emmydyahrahmawati@gmail.com

Abstract. *The Government of Surabaya has empowered by providing Direct Cash Assistance (BLT) in accordance with the Regulations of the Mayor of Surabaya No. 130 Year 2023 on the Implementation of Direct Cash Aid to the Poor Families in the City of Surabaya through Jatim Bank and has been implemented in Klampis Ngasem Village of Surabaya, but many still do not know about the BLT of the Government of this city. As a result, the implementation of the BLT is still unclear. The research uses the Shanahan Narrative Policy Framework (NPF) Theory and descriptive qualitative methods with an approach through observations, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of the BLT in Klampis Ngasem Village Surabaya has been well carried out and was welcomed by the very high enthusiasm of the community. However, in Klampis Ngasem Village there is still a lack of knowledge about the BLT and the Solid Work Program because there is no socialization about it. At the micro level, societies are used to relying on help so there is no desire to be independent and difficult to move towards prosperity. At the meso level, there is still a lack of communication about the BLT of the City Government between the institutions and the related apparatus that affects public understanding. At the macro level, the lack of transparency of the data and the criteria of the recipient by the agency on the relevant apparatus. The City Government also created a culture of dependence on aid in Klampis Ngasem Village Surabaya.*

Keywords: *Analysis, BLT, NPF*

Abstrak. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemberdayaan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya melalui Bank Jatim dan sudah terlaksana di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya, namun masih banyak yang belum mengetahui mengenai BLT Pemerintah Kota ini. Akibatnya pelaksanaan BLT masih belum jelas. Penelitian ini menggunakan Teori *Narrative Policy Framework* (NPF) menurut Shanahan dan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya sudah terlaksana dengan baik dan disambut antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat. Program Padat Karya juga ditawarkan sebagai penyeimbangannya. Namun, di Kelurahan Klampis Ngasem masih kurang pengetahuan mengenai BLT dan Program Padat Karya karena tidak ada sosialisasi mengenai hal tersebut. Pada level mikro masyarakat sudah terbiasa bergantung pada bantuan sehingga tidak ada keinginan untuk mandiri dan sulit digerakkan menuju kemakmuran. Pada level meso masih terjadi kurangnya komunikasi mengenai BLT Pemerintah Kota antara lembaga dan aparaturnya yang berdampak pada pemahaman masyarakat. Pada level makro terjadi kurangnya transparansi data dan kriteria penerima oleh lembaga pada aparaturnya. BLT Pemerintah Kota juga menciptakan budaya ketergantungan pada bantuan di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya.

Kata kunci: Analisis, BLT, NPF

LATAR BELAKANG

Pemasalahan publik di Indonesia saat ini sangat beragam dari berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Masalah masyarakat yang sering kali menjadi sorotan adalah PMKS, sebuah isu yang terus menerus muncul di Indonesia. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ialah sekelompok individu yang mengalami rintangan, kesukaran, atau gangguan yang mencegah mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam fungsi-fungsi sosialnya, menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Kendala-kendala ini meliputi kemiskinan, pengabaian, cacat, kerugian sosial, keterbelakangan, isolasi, dan dampak negatif perubahan lingkungan, seperti bencana alam. Pemerintah terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut secara tuntas. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan mendistribusikan bantuan sosial. Bantuan Sosial (bansos) pemerintah kembali diberikan kepada masyarakat. Penerima bantuan sosial menerima dukungan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka (Melati Putri Arsika, 2024). Ada banyak jenis bantuan sosial yang diberikan, seperti PKH, BLT El Nino, Beras, BPNT, dan PIP.

Kota Surabaya merupakan contoh kemajuan di Provinsi Jawa Timur yang sering menjadi inspirasi untuk kemajuan di wilayah lain. Kota Surabaya berkembang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, menarik penduduk dari seluruh dunia untuk tinggal. Kota Surabaya memberikan kontribusi terbesar terhadap kepadatan penduduk Jawa Timur, provinsi terpadat kedua di Indonesia (Salim, 2023). Oleh karena itu, arus urbanisasi yang berlebihan terjadi di kota besar seperti Surabaya dan dapat menyebabkan masalah yang serius seperti PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Kota Surabaya dianggap sebagai salah satu yang paling serius menangani masalah kesejahteraan sosial PMKS utama ini, khususnya pada kategori Keluarga Miskin yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga, Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan PMKS khususnya Keluarga Miskin juga dilakukan dengan memberikan bantuan sosial salah satunya yaitu Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai juga dikenal dengan sebutan BLT adalah bantuan sosial dengan memberikan uang kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya. Bantuan Langsung Tunai ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya.

Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kota diberikan sebesar Rp200.000 setiap bulan. Faktanya, sejak awal tahun 2024 bantuan langsung tunai ini diberikan kepada keluarga miskin di Kota Surabaya yang belum pernah menerima bantuan sosial. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan masyarakat dapat berkembang dan sejahtera. Daftar penerima BLT merupakan warga yang masuk ke dalam data keluarga miskin Pemerintah Kota Surabaya. Selain masuk ke dalam data keluarga miskin, penerima BLT ini tidak dapat menerima bantuan sosial ganda. Distribusi Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Bank Jatim dan menerbitkan *Virtual Account* kepada penerima bantuan. Dinas Sosial Kota Surabaya memastikan Bantuan Langsung Tunai ini telah disalurkan ke 31 Kecamatan yang ada di Kota Surabaya.

Diantara 31 kecamatan di Kota Surabaya yang menjadi titik penyebaran Bantuan Langsung Tunai ini adalah Kecamatan Sukolilo. Kecamatan ini membawahi beberapa kelurahan yang menjadi bagian administratifnya yaitu antara lain Kelurahan Semolowaru, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kelurahan Klampis Ngasem, Kelurahan Menur Pumpungan, Kelurahan Gebang Putih, Kelurahan Medokan Semampir, dan Kelurahan Keputih. Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu di Kelurahan Klampis Ngasem.

Tabel 1. Data Penerima BLT Pemerintah Kota Kelurahan Klampis Ngasem

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	67
2	Februari	28
3	Maret	19
4	April	19

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2024

Peneliti menemukan masih banyak orang di Kelurahan Klampis Ngasem belum mengetahui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota yang berlaku mulai awal tahun 2024. Akibatnya pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai di Kelurahan Klampis Ngasem masih belum jelas. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bantuan langsung tunai menggunakan narrative policy framewok di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Menurut ahli, istilah "kebijakan publik" dan "kebijakan" memiliki banyak arti. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 04 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah menetapkan istilah-istilah

untuk kebijakan publik. Kebijakan publik ialah suatu keputusan yang dibuat oleh negara, terutama pemerintahan, sebagai cara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Ini adalah proses atau metode yang bermanfaat untuk membawa warga negara di awal, memasuki masa transisi, dan menuju masyarakat yang diimpikan. Pada dasarnya, kebijakan publik adalah aktivitas yang unik, memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh kebijakan lain (Haudi, 2021). Kebijakan publik biasanya dipikirkan, dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas di sistem politik, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, hakim, dan administratif.

Narrative Policy Framework

Narrative Policy Framework adalah pendekatan atau rangka kerja penelitian tentang proses kebijakan publik, Shanahan dalam (Salahudin, 2019). NPF menekankan bahwa sebelum menggunakan NPF sebagai rangka kerja penelitian, peneliti harus mempertimbangkan lima core asumsi NPF berikut : 1) Konstruksi sosial, merupakan bagian yang paling penting dari realitas kebijakan publik yakni realitas sosial yang dikonstruksikan, 2) Relatifitas yang terikat. Kebijakan sebagai bagian dari konstruksi sosial yang menciptakan realitas kebijakan yang berbeda, variasi ini merupakan terikat dan terintegrasi dalam sebuah kebijakan (seperti sistem politik, dan ideologi), 3) Elemen-elemen struktur yang bersifat umum dirumuskan secara spesifik dan dapat diidentifikasi, 4) Terdapat tiga level analisis: mikro (individual), meso (group), dan makro (budaya dan institusi), 5) Narrative dipahami untuk memposisikan peran pengetahuan manusia, komunikasi. Penelitian berfokus pada bagaimana orang membuat narasi dan dibentuk oleh narasi pada tingkat mikro.

Pengertian Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan bantuan sosial sebagai “bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial”. Seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah penerima bantuan sosial. Bantuan sosial dibagi menjadi dua kategori, sementara dan berkelanjutan. Bansos untuk bencana alam dapat diberikan melalui kementerian atau lembaga "dengan syarat" atau "tanpa syarat".

Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai adalah kebijakan pemerintah yang dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Program ini adalah bukti tindakan pemerintah yang menganut nilai tertentu, yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik dengan menggunakan sumber daya yang

tersedia, khususnya masalah kemiskinan (Pramanik, 2020). Tujuan dari Bantuan Langsung Tunai adalah untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan untuk mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan mereka sebagai akibat dari kesulitan ekonomi dan tingkat tanggung jawab sosial bersama. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya. Peraturan tersebut menetapkan sasaran program dari Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kota.

METODE PENELITIAN

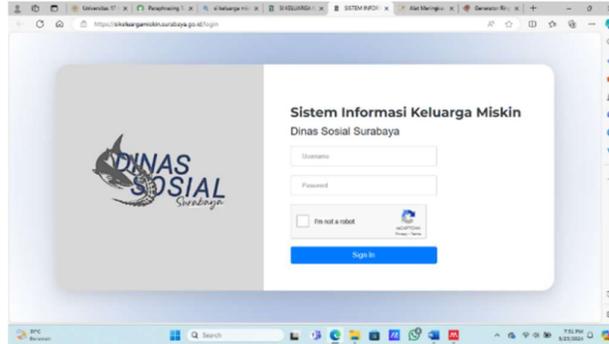
Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif, dengan memfokuskan pada Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan *Narrative Policy Framework* di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dengan melihat 5 (lima) core asumsi *Narrative Policy Framework* (NPF) yaitu Kontruksi Sosial, Relatifitas yang Terikat, Elemen – Elemen yang Terstruktur, Level Analisis, dan *Narrative*. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung tentang bantuan langsung tunai, dan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen seperti LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), buku, e - Jurnal, website yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data yang pertama pengumpulan data, kedua penyajian data dan ketiga kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan program bantuan langsung tunai diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya yang menjadi dasar dan acuan dalam penyaluran bantuan langsung tunai agar tertib, adil dan tepat sasaran. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimaksud dalam Peraturan Walikota tersebut merupakan bantuan yang berasal dan diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan dan dikhususkan bagi keluarga miskin yang belum sama sekali menerima bantuan baik dari pusat maupun kota. Pelaksanaan penyaluran BLT di Kota Surabaya termasuk di Kelurahan Klampis Ngasem dilaksanakan setiap bulan sejak awal Januari 2024 dengan diberikannya undangan dari Dinas Sosial kepada masyarakat yang menerima dan telah terdaftar di data keluarga miskin. Data keluarga miskin tersebut sudah ada di dalam aplikasi Si Keluarga Miskin. Aplikasi Si Keluarga Miskin adalah aplikasi milik Pemerintah Kota Surabaya yang

membantu penyinkronan data keluarga miskin mulai dari tingkat RT hingga Kecamatan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan mendata keluarga miskin agar bantuan pemerintah dapat diberikan dengan tepat, efektif, dan efisien.

Gambar 1. Halaman Beranda Aplikasi Si Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Surabaya



Sumber : Google, 2024

Aplikasi ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program bantuan yang telah dilaksanakan. Penting untuk dijaga kerahasiaan data yang dimasukkan dalam aplikasi ini, sehingga data yang terus diperbarui akan terjamin dan tidak disalahgunakan. Menurut keterangan dari pihak Dinas Sosial, aplikasi Si Keluarga Miskin ini hanya bisa diakses oleh UPT (Dinas Sosial Kota Surabaya). Dalam pelaksanaan pemberian BLT, data nama – nama usulan dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan oleh pihak Dinas Sosial dimasukkan ke dalam aplikasi Si Keluarga Miskin dan diverifikasi dengan melakukan survey lapangan. Hasil survey tersebut diolah datanya dengan rumus PMT (*Proxy Means Test*) yang ada di aplikasi Si Keluarga Miskin, sehingga penetapan penerima BLT dilakukan secara *by system*. Kepala Dinas akan memvalidasi penerima BLT dan pihak Dinas Sosial akan memberikan undangan kepada masyarakat yang menerima untuk pengambilan BLT. Undangan tersebut disalurkan melalui Kelurahan untuk disampaikan kepada RT/RW setempat kemudian diberikan ke warga penerima manfaat. Warga akan datang ke tempat pengambilan BLT sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Dinas Sosial juga bekerjasama dengan Bank Jatim dalam penyaluran. Dinas Sosial akan memberikan dana yang akan diberikan sesuai jumlah penerima yang ada di data penerima BLT tersebut. Data penerima dari Dinas Sosial juga diberikan kepada Bank Jatim untuk dikeluarkan kode *Virtual Account* tiap penerima. Ketika pengambilan, penerima manfaat memberikan undangan yang telah diterima ke petugas Bank Jatim yang kemudian akan di cek kembali dengan data dari Dinas Sosial. Jika sudah sesuai, petugas akan memproses penarikan dana bantuan tersebut, tanda tangan dan foto sebagai bukti bahwa warga tersebut telah menerima bantuan.

Gambar 2. Penyaluran BLT oleh Petugas Bank Jatim



Sumber: Pemerintah Kota Surabaya, Google, 2024

1. Konstruksi Sosial

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), konstruksi sosial merupakan bagian yang paling penting. Karena konstruksi sosial ini dilakukan dengan membangun interaksi dan komunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan. Tujuannya agar informasi mengenai kebijakan tersebut dapat tersampaikan dengan jelas. Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi sosial pada pelaksanaan BLT Pemerintah Kota di Kelurahan Klampis Ngasem belum dilaksanakan. Pada pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dapat ditemukan bahwa tidak ada sosialisasi kepada masyarakat terkait BLT Pemerintah Kota yang sedang disalurkan saat ini. Sehingga pemahaman informasi mengenai BLT ini oleh masyarakat masih sangat minim. Masyarakat hanya mengetahui ketika diberi undangan pengambilan BLT, mereka menjadi salah satu penerima manfaat yang terpilih. Lain hal mengenai BLT ini mereka tidak mengetahuinya. Meskipun minim informasi mengenai BLT yang diberikan, masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem sangat bergantung pada bantuan ini. Ketergantungan masyarakat ini mengakibatkan terjadinya aksi protes jika bantuan tidak mereka terima. Pihak RT/RW memberi penjelasan bahwa BLT diberikan secara bertahap dan jika ada warga yang layak menerima tetapi belum menerima akan diusulkan kembali. Namun keputusan akhir penerima ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Dinas Sosial) Kota Surabaya.

2. Relatifitas yang Terikat

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), relatifitas yang terikat merupakan bagian dari konstruksi sosial yang direalisasikan. Relatifitas yang terikat digunakan untuk melihat realitas tentang adanya kebijakan yang sedang diterapkan. Realitas tersebut ada hubungan antara tujuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan kebijakan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, realitas yang ada

dapat dilihat dari tujuan pemerintah dengan memberikan BLT akan menurunkan tingkat kemiskinan dan akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Sebagai pendampingnya pemerintah juga menawarkan Program Padat Karya untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan keahliannya. Namun, program pelatihan ini ditolak oleh banyak masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem yang pengangguran dan masuk ke dalam keluarga miskin. Mereka menolak karena berbagai alasan dan takut sebelum memulai. Mereka hanya memilih untuk bergantung pada bantuan pemerintah termasuk BLT ini. Masyarakat memprotes jika tidak menerima bantuan tanpa mengetahui bahwa data penerima yang ada di Kelurahan dan RT/RW berasal dari Dinas Sosial. Terkait data penerima, realitas yang terjadi terdapat ketidaksinkronan data antara data dari Kelurahan Klampis Ngasem dan data dari Dinas Sosial yang memungkinkan data tersebut bukan data penerima BLT Pemerintah Kota namun jenis BLT yang lain.

3. Elemen – elemen yang Terstruktur

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), elemen – elemen terstruktur yang bersifat umum dirumuskan secara spesifik dan dapat diidentifikasi. Elemen – elemen yang terstruktur merupakan bagian dari pelaksana kebijakan. Elemen – elemen yang terstruktur mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Mulai dari tingkat yang paling atas hingga bawah. Pada pelaksanaan BLT Pemerintah Kota, Pemerintah Kota Surabaya dengan bantuan berbagai pihak terkait seperti Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, KSH (Kader Surabaya Hebat), serta Bank Jatim yang bertindak sebagai bank pembantu dalam penyaluran BLT. Di Kelurahan Klampis Ngasem, pihak Kelurahan dan RT/RW telah dilibatkan dengan dibantu oleh Kader KSH yang turun ke lapangan secara langsung untuk mengetahui keadaan masyarakat secara nyata. Kader – kader ini yang membantu untuk mendampingi jika tim survei dari Dinas Sosial mengunjungi masyarakat yang diusulkan. Selain KSH, ada petugas Bank Jatim sangat membantu masyarakat dalam pencairan dana BLT karena mereka memiliki instruksi yang jelas dan layanan mereka tidak rumit. Proses pengambilan juga cukup mudah.

4. Level Analisis

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019) analisis dalam *Narrative Policy Framework* (NPF) terdapat 3 (tiga) level, yaitu mikro (individu), meso (group), dan makro (budaya dan institusi).

4.1 Level Mikro

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), pada level mikro fokus penelitian

pada pertanyaan bagaimana individu membuat narasi dan dibentuk oleh narasi. Artinya, fokus utama dalam penelitian tingkat ini yaitu adanya narasi yang diciptakan dan dampak yang ditimbulkan dalam memengaruhi cara individu berpikir dan bertindak. Narasi dalam hal ini adalah deskripsi atau penjelasan mengenai suatu kebijakan. Kebijakan dalam penelitian ini yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian karena memang tidak ada sosialisasi mengenai BLT Pemerintah Kota Surabaya dan pengetahuan mendalam mengenai Program Padat Karya yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, orang-orang yang menerima BLT dan bantuan lain di Kelurahan Klampis Ngasem sebagian besar tidak dapat diajak untuk mencapai tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Karena telah ketergantungan mereka pada BLT, Program Padat Karya yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota ditolak, mereka bergantung pada bantuan saja dan tidak mau berusaha. Akibatnya, tidak ada keinginan untuk lepas dari bantuan atau mandiri. Pemerintah selalu berusaha mendorong, menggerakkan dan membantu mereka keluar dari taraf hidup yang tidak layak. Namun, hanya sebagian masyarakat yang dapat diajak dan digerakkan menuju kemakmuran. Meskipun di sisi lain mereka setuju dengan tujuan pemerintah dan BLT yang diberikan sesuai dengan harapan.

4.2 Level Meso

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), pada level meso penelitian fokus pada bagaimana aktor kebijakan membangun dan mengkomunikasikan narrative kepada proses kebijakan yang berpengaruh. Artinya, penelitian dalam tingkat ini berfokus pada bagaimana aktor – aktor kebijakan membangun dan mengkomunikasikan narasi (penjelasan) yang bertujuan untuk memengaruhi proses kebijakan yang sedang berlangsung. Level meso dalam penelitian ini berkaitan dengan *interest group* atau orang – orang yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan. *Group* atau orang – orang yang dimaksud tersebut dalam penelitian ini adalah Pengurus Kelurahan, RW, RT, Kader KSH, dan Petugas Bank Jatim yang membantu dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mereka bekerja sama untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial, Kelurahan, dan Pengurus RT/RW. Pengurus RT/RW mengakui bahwa tidak ada informasi yang diberikan oleh Kelurahan tentang BLT Pemerintah Kota ini. Pihak Kelurahan Klampis Ngasem juga kurang mengetahuinya. Namun pihak Dinas Sosial mengatakan mengatakan bahwa camat dan lurah telah diberitahu tentang

BLT ini sehingga mereka dapat memberi tahu pengurus RT/RW dan masyarakatnya. Ini juga berdampak pada bagaimana warga memahami BLT yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

4.3 Level Makro

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), pada level makro penelitian mengolaborasi pertanyaan riset bagaimana perubahan atau stabilitas kebijakan dalam konteks budaya dan institusi politik. Artinya, penelitian ini berfokus pada pemahaman bagaimana suatu kebijakan dapat berubah atau tetap stabil dengan mempertimbangkan budaya dan institusi yang ada. Level makro pada penelitian ini berkaitan dengan lembaga atau institusi yang mengeluarkan dan menerapkan kebijakan, serta budaya yang diciptakan dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, lembaga atau institusi yang dimaksud adalah Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan dan melaksanakan pemberian BLT serta budaya yang tercipta akibat adanya BLT ini dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Surabaya masih kurang koordinasi serta transparansi mengenai data dan kriteria penerima BLT. Karena pada kenyataannya masih ada yang menerima bantuan ganda dan tidak tepat sasaran ketika undangan pengambilan BLT dibagikan. Pihak Kelurahan dan pengurus RT/RW tidak mengetahui siapa saja yang masuk ke dalam data penerima bantuan. Mereka juga tidak mengetahui kriteria yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk menentukan keluarga yang layak mendapatkan bantuan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya ketergantungan bantuan di Kelurahan Klampis Ngasem telah mereajalela. Masyarakat tidak akan berhenti bergantung. Sehingga pemerintah harus mempertimbangkan kembali jika bantuan ini diberikan secara konsisten, agar masyarakat juga terdorong untuk mandiri, kreatif dan inovatif.

5. Narrative

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), narrative dipahami untuk memposisikan peran pengetahuan manusia, komunikasi. Narrative dalam *Narrative Policy Framework* (NPF) ini merupakan bagian dari pendeskripsian temuan – temuan mengenai suatu kebijakan menjadi sebuah cerita. Bagian narrative dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menceritakan beberapa temuan penelitian yang telah dilakukan mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan beberapa fakta yang ada di lapangan. **Pertama**, Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah Kota telah tersalurkan kepada masyarakat di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dan mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat Klampis Ngasem. Antusias yang berlebih membuat mereka juga merasa bergantung pada BLT yang diberikan. Masyarakat mengharapkan bantuan tunai seperti ini akan diberikan secara konsisten dan berkesinambungan dalam jangka yang panjang oleh pemerintah di setiap bulannya. Karena dengan bantuan ini mereka juga akan mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan misi dan tujuannya dalam mengurangi angka kemiskinan. Dalam mengimbangi adanya BLT, pemerintah juga menawarkan Program Padat Karya. Karena untuk mewujudkan misi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan maka pengangguran juga harus dihapuskan. Di Kelurahan Klampis Ngasem Program Padat Karya telah ditawarkan kepada masyarakat tetapi banyak yang menolak dan tidak tertarik dengan program pelatihan ini karena berbagai alasan. Dibandingkan harus mengikuti program pelatihan, masyarakat lebih memilih untuk mengandalkan bantuan saja. Mereka tetap memilih menunggu mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membantu perekonomian mereka. Sehingga melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya yang masuk kategori keluarga miskin terlebih lagi mendapatkan bantuan tunai belum bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Surabaya yang sejahtera tanpa adanya kemiskinan yang berkepanjangan. Masih sebagian saja masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya yang bisa diajak dan digerakkan menuju kehidupan yang makmur. Hal itu dikarenakan mereka telah ketergantungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, akibatnya tidak mempunyai keinginan untuk mandiri. Budaya ketergantungan bantuan di Kelurahan Klampis Ngasem telah merajalela. **Kedua**, masyarakat Klampis Ngasem tidak mengetahui hakekat dari BLT yang diberikan. Mereka tidak memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup tentang BLT dan hanya mengetahui bahwa mereka merupakan bagian dari penerima BLT. Menurut fakta di lapangan ini disebabkan karena bahwa tidak ada sosialisasi tentang BLT Pemerintah Kota yang diberikan di Kelurahan Klampis Ngasem. Saat tidak ada sosialisasi seperti ini, masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dan merasa bahwa mereka seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah melakukan protes. Walaupun mereka melakukan aksi protes, pengurus RT/RW juga tidak mengetahui tentang data penerima BLT. Namun setelah melakukan penelitian, ternyata aparaturnya sendiri termasuk pengurus RT, RW, dan Lurah, tidak mengetahui banyak tentang BLT ini. Sebaliknya, Dinas Sosial Kota Surabaya mengatakan bahwa BLT Pemerintah Kota yang sedang diberikan telah diberitahukan

kepada Lurah atau Camat untuk disampaikan kepada pengurus RT/RW dan warganya. Sehingga dengan demikian peneliti menemukan adanya komunikasi yang kurang antara Dinas Sosial, Kelurahan dan pengurus RT/RW. Hal ini juga berdampak pada bagaimana masyarakat memahami bantuan yakni BLT yang diberikan oleh pemerintah. **Ketiga**, Pengurus RT/RW dan Kelurahan tidak hanya kurang mengetahui BLT Pemerintah Kota, tetapi mereka juga tidak mengetahui data penerima BLT yang diberikan. Karena Dinas Sosial Kota Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya) yang menetapkan keluarga miskin yang menerima. Penerima BLT dari Pemerintah Kota Surabaya adalah keluarga miskin yang belum pernah menerima bantuan apapun sebelumnya dan telah terdaftar di aplikasi Si Keluarga Miskin milik Pemerintah Kota Surabaya. Sehubungan dengan data keluarga miskin yang ada di aplikasi Si Keluarga Miskin, hanya unit pelaksana teknis Dinas Sosial Kota Surabaya yang dapat mengakses aplikasi tersebut. Pengurus RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan hanya dapat membantu warga dalam pendaftaran SKKM (Surat Keterangan Keluarga Miskin). Jika data dari Dinas Sosial sudah ada, seharusnya sudah valid. Namun, ada beberapa data tidak tepat sasaran dan mendapatkan bantuan ganda. sehingga perlu pendataan ulang. Ketika hal tersebut terjadi, pihak Kelurahan dan pengurus RT/RW tidak mengetahui kriteria penilaian yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk menentukan penerima bantuan. Ketika peneliti meminta data penerima BLT kepada pihak Kelurahan Klampis Ngasem, ternyata data yang diterima peneliti dari Kelurahan tidak sinkron dengan data yang diterima dari Dinas Sosial. Hal ini terjadi karena data dari Dinas Sosial tidak transparan kepada aparat yang membantu, seperti Kelurahan dan pengurus RT/RW. Untuk memastikan data penerima BLT sesuai dengan kriteria, koordinasi data antara Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, dan pengurus RT/RW seharusnya sangat diperlukan. **Keempat**, selain bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan, dan pengurus RT/RW, pelaksanaan BLT Pemerintah Kota Surabaya juga didukung oleh beberapa pihak lain termasuk KSH dan Bank Jatim yang bertindak sebagai bank pembantu dalam penyaluran dana bantuan. Dalam hal ini, pelaksanaan BLT Pemerintah Kota di Kelurahan Klampis Ngasem telah melibatkan pengurus RT/RW dengan bantuan kader relawan, seperti KSH. Dengan bantuan kader KSH, pengurus RT/RW dapat terbantu dalam mengusulkan orang-orang yang layak untuk masuk ke data Keluarga Miskin dan mendapatkan bantuan. Kader KSH yang ada di Kelurahan Klampis Ngasem juga membantu mendampingi jika tim survey dari Dinas Sosial mengunjungi masyarakat yang diusulkan. Selain kader KSH, ada juga petugas Bank Jatim yang membantu dalam pembagian dana. Petugas Bank Jatim sangat membantu masyarakat dalam pencairan dana BLT karena mereka memiliki instruksi

yang jelas dan layanan mereka tidak berbelit. Proses dalam pengambilan dana bantuan juga cukup mudah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya sudah terlaksana dengan baik. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya menjadi aturan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai agar tertib, adil, dan tepat sasaran. Masyarakat di Kelurahan Klampis Ngasem menyambut dengan antusiasme yang sangat tinggi dan berharap BLT akan terus diberikan secara konsisten untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari – hari. Tidak hanya memberikan BLT saja, namun Pemerintah Kota Surabaya juga mengimbangi dengan Program Padat Karya. Di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya masih kurang pengetahuan mengenai BLT Pemerintah Kota dan Program Padat Karya karena tidak ada sosialisasi dan pemahaman mengenai hal tersebut. Pada level mikro menunjukkan bahwa masyarakat sudah terbiasa bergantung pada bantuan yang mengakibatkan masyarakat tidak ada keinginan untuk lepas dari bantuan atau mandiri. Pada level meso menunjukkan bahwa lembaga dan aparatur terkait seperti Dinas Sosial, Kelurahan dan Pengurus RT/RW masih kurang komunikasi mengenai BLT Pemerintah Kota yang berdampak apada pemahaman masyarakat pada BLT Pemerintah Kota yang diberikan. Pada level makro menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai lembaga penyelenggara masih kurang melakukan transparansi data dan kriteria penerima BLT dengan apartur pembantu mulai dari Kelurahan dan Pengurus RT/RW. Pemberian BLT Pemerintah Kota telah menciptakan budaya ketergantungan pada bantuan dan budaya tersebut telah menyebar luas di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya sehingga masyarakat tidak akan berhenti bergantung dan kurang berinisiatif serta mandiri dalam mengembangkan diri mereka. Meskipun telah memberikan manfaat, Dinas Sosial harus mengadakan rapat evaluasi rutin setiap triwulan sekali dengan Kecamatan, Kelurahan, serta RT dan RW untuk memastikan ketepatan sasaran, mencegah pemberian ganda, dan mengatasi masalah dalam pelaksanaan. Kelurahan Klampis Ngasem perlu mengembangkan platform resmi untuk sosialisasi dan pengajuan BLT Pemerintah Kota dan Program Padat Karya. Mereka juga perlu melakukan sosialisasi dengan bantuan KSH di acara pertemuan warga.

DAFTAR REFERENSI

- Haudi. (2021). *Kebijakan Publik* (Hadion Wijoyo, Ed.). Insan Cendekia Mandiri.
- Melati Putri Arsika. (2024, January 6). *5 Jenis Bansos 2024 Bakal Cair! Cek Nama Penerima di Link Ini*. Detiksumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7127711/5-jenis-bansos-2024-bakal-cair-cek-nama-penerima-di-link-ini>
- Pramanik, N. D. (2020). *DAMPAK BANTUAN PAKET SEMBAKO DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT PADALARANG PADA MASA PANDEMI COVID 19*.
- Salahudin. (2019). *Narrative Policy Framework*.
- Salim, H. (2023). Fenomena Urbanisasi Kota Surabaya (Studi Pertambahan Penduduk Berusia Muda). *Prosiding Seminar Nasional*, 938–946.